

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan saat ini merupakan sarana yang paling efektif untuk mengkomunikasikan informasi tentang keuangan perusahaan. Selama periode waktu yang telah ditentukan, laporan keuangan secara alami akan digunakan sebagai faktor dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pengguna internal dan eksternal perusahaan (Yendrawati *et al.*, 2019). Kondisi terbaik untuk kinerja perusahaan harus ditunjukkan oleh informasi laporan keuangan. Menurut Wicaksana & Suryandari (2019), sebuah laporan keuangan akan dihasilkan dan berfungsi dengan baik jika mengandung informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami (Wicaksana & Suryandari, 2019). Kepentingan satu pihak tidak boleh dimasukkan dalam informasi laporan keuangan (Wicaksana & Suryandari, 2019).

Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan no. Tentang perseroan terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 tentang BUMN dan UU No. 19 Tahun 2003 Ditekankan bahwa laporan keuangan direksi harus disajikan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Pasar Modal 1995. Sebagian besar, administrasi organisasi dapat merencanakan laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan terbaik. Karena penyusunannya tidak mengikuti karakteristik kualitatif pelaporan keuangan, hal ini dapat menyebabkan munculnya kecurangan dalam laporan keuangan (Frymaruwah, 2020). Ketika terdapat inkonsistensi antara informasi yang disajikan oleh

manajemen dan investor, maka peluang kecurangan dalam laporan keuangan akan meningkat (Agusputri & Sofie, 2019).

Laporan keuangan merupakan salah satu cara manajemen untuk mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan selama periode waktu tertentu. Sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan, manajemen berusaha untuk membuat laporan tersebut semenarik mungkin untuk memenuhi kebutuhan penggunanya (Sukmadilaga *et al.*, 2022). Sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan harus disusun dan disajikan secara jujur dan transparan. Namun, masih terdapat kecurangan dalam praktik pelaporan keuangan Indonesia (Chusanudin & Ramadhan, 2022).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai tindakan ilegal dan sengaja memanipulasi dan memberikan laporan palsu kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Kecurangan laporan keuangan terjadi ketika perusahaan menyajikan pendapatan atau aset yang lebih besar dari yang sebenarnya untuk menarik calon investor atau kreditur agar menyediakan dana atau modal (ACFE, 2020)..

Dalam survei *fraud* Indonesia 2019, *Association of Certified Fraud Examiners*, atau disingkat ACFE, menemukan bahwa ada tiga jenis penipuan di Indonesia. Dengan total persentase 64,4%, korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia, diikuti oleh penyalahgunaan aset negara dan perusahaan dengan total persentase 28,9%, dan kecurangan laporan keuangan dengan total persentase 6,7% (ACFE, 2019). Terlepas dari kenyataan bahwa persentase kecurangan laporan keuangan

lebih rendah daripada jenis kecurangan lainnya, hasil di atas masih menunjukkan bahwa itu adalah bentuk kecurangan yang merugikan.

Survei dilakukan terhadap 239 orang (ACFE, 2020), hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah merupakan institusi terbesar yang menderita kerugian akibat kecurangan. Hasil survei menunjukkan bahwa 48,5% responden menilai pemerintah mengalami kerugian besar akibat kecurangan. Selain itu, 31,8% responden berpendapat bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan lembaga atau organisasi yang paling dirugikan oleh kecurangan. Perusahaan swasta berada di urutan kedua, dengan 15,1%, diikuti oleh organisasi nirlaba dengan 2,9%, dan terakhir lainnya dengan 1,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa organisasi BUMN memiliki hubungan yang sangat dekat dan besar dengan terjadinya tindak kecurangan. Hal ini didukung dengan munculnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan di BUMN Indonesia, seperti PT. Garuda Indonesia sebelumnya. Kasus misrepresentasi ini terjadi pada tahun 2019, sebagai aturan, organisasi harus mendistribusikan laporan tahunannya (Ananta, 2019). PT Garuda Indonesia merilis laporan setiap tahun pada 2018. Menurut Garuda Indonesia, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar USD809,85 juta atau RP11,33 miliar dengan kurs Rp14.000,-. Sebaliknya, PT. Garuda Indonesia Pada triwulan III 2018, seharusnya Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar USD114,08 (Hartomo, 2019), yang tentunya menimbulkan kontroversi dan menimbulkan kecurigaan lantana. Selain itu, diketahui bahwa keuntungan yang dimasukkan berasal dari utang PT. Garuda Indonesia menggunakan teknologi Mahata Aero untuk mengatur wifi. Tentu saja, kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia juga ikut terseret dalam kasus ini. Setelah Garuda Indonesia, menteri keuangan membekukan izin dan kantor akuntan public selama satu tahun (Kusuma, 2019).

Selain itu, ada contoh kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron yang dalam situasi ini menyeret kantor akuntan publik Arthur Anderson yang kemudian bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan kemitraan Enron. Arthur Anderson kehilangan reputasinya akibat kasus ini dan keluar dari jajaran *the big five* kantor akuntan publik (Rusmana & Tanjung, 2019). Melihat banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kecurangan laporan keuangan, penting untuk memiliki rencana pengendalian penanggulangan yang keliru untuk laporan keuangan.

Teori *triangle fraud* yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953, teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe Hermanson yang diperbarui pada tahun 2004, dan teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh Crowe yang dikembangkan pada tahun 2011 menjadi acuan dalam penelitian ini adalah contoh faktor yang dapat memengaruhi munculnya potensi penipuan atau *fraud*. Teori kecurangan terbaru *Fraud Hexagon* atau Model S.C.C.O.R.E, yaitu tekanan (*stimulus*), kemampuan (*capability*), kolusi (*collusion*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan ego (*arrogance*) dikembangkan oleh Vousinas pada tahun 2019. Komponen kolusi adalah aspek baru dari teori *fraud hexagon*. Vousinas (2019) mendefinisikan kolusi sebagai kerja sama antara banyak pihak, termasuk individu, kelompok, pihak di luar organisasi, dan karyawan di dalam organisasi. Karena atmosfer organisasi yang tidak jujur, karyawan yang jujur akan ikut serta dalam kecurangan ketika kecurangan kolusif terjadi. Dengan demikian, iklim eksploitatif ini akan berkembang dan berubah menjadi budaya hierarkis yang sulit dihilangkan. Selain itu, Vousinas (2019) menjelaskan bahwa kepribadian yang persuasif akan lebih mudah meyakinkan orang lain untuk melakukan penipuan. Memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengambil posisi orang lain adalah cara kolusi lainnya (Kusumosari, 2020).

Karena banyak penelitian sukses telah dilakukan di masa lalu, faktor kecurangan *fraud hexagon* dipilih sebagai referensi untuk penelitian ini. Stabilitas keuangan dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, menurut penelitian sebelumnya oleh Imtikhani (2021), sedangkan variabel lain tidak berpengaruh. Studi berbeda oleh Desviana *et al.* (2020) menemukan bahwa, jika dibandingkan dengan variabel lain dalam penelitian ini, tekanan kepatuhan, kompetensi, perilaku tidak etis, dan efektivitas organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Menurut Larum *et al* (2021), tekanan eksternal, stabilitas keuangan, perubahan direksi, dan jumlah gambar *CEO* memiliki potensi positif untuk laporan keuangan menjadi penipuan, tetapi yang lainnya variabel tidak berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, ditemukan bahwa hasilnya berbeda. Tentu saja, hal ini karena adanya perbedaan hasil atau kesenjangan penelitian antar studi. Akibatnya, dengan menggunakan teori *fraud hexagon*, para peneliti dalam penelitian ini memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penipuan pada laporan keuangan. Fakta bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel tekanan yang diproksikan dengan kebutuhan keuangan pribadi dan target keuangan, variabel ego atau arogansi yang diproksikan dengan dualitas *CEO*, variabel kapabilitas yang diproksikan dengan masa jabatan *CEO*, variabel peluang yang diproksikan dengan diproksikan dengan kualitas audit dan sifat industri, variabel rasionalisasi yang diproksikan dengan pendapat auditor, dan variabel kolusi yang diproksikan dengan koneksi politik merupakan perbedaan utama antara penelitian ini dengan sebelumnya. diketahui dari pemeriksaan lain, dalam penelitian ini variabel dependen akan diestimasi menggunakan Model *F-Score* untuk dapat mengetahui potensi pungli dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *Go Public* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” sesuai dengan uraian di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
2. Apakah *personal financial need* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
3. Apakah *nature of industry* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
4. Apakah *audit quality* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
5. Apakah *CEO tenure* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
6. Apakah *auditor's opinion* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
7. Apakah *CEO duality* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
8. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti berdasarkan pengamatan berkaitan dengan:

1. Pengaruh *financial target* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
2. Pengaruh *personal financial need* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
3. Pengaruh *nature of industry* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan?
4. Pengaruh *audit quality* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.
5. Pengaruh *CEO tenure* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.
6. Pengaruh *auditor's opinion* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.

7. Pengaruh *CEO duality* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.
8. Pengaruh *political connection* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai teori-teori *fraud* terbaru yang digunakan untuk menunjang penelitian ini khususnya teori *fraud hexagon*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran guna memitigasi timbulnya aksi kecurangan melalui motif kecurangan laporan keuangan pada organisasi.

